

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manufaktur ilegal, perdagangan dan pengalihan senjata api dan senjata konvensional lainnya merupakan ancaman utama bagi keamanan dan pembangunan manusia dan sering dikaitkan dengan bentuk lain dari kejahatan terorganisir dan kegiatan teroris.<sup>1</sup> Dampak dari penyebaran senjata yang tinggi telah berdampak terhadap keselamatan masyarakat sipil terutama masyarakat Amerika Latin dan masyarakat area konflik dimana akses senjata tersebut dimanfaatkan oleh kelompok kriminal terutama teroris.<sup>2</sup> Kondisi ini memberikan urgensi bagi seluruh aktor hubungan internasional untuk segera berupaya dalam menangani kasus peredaran senjata terutama dalam mengatasi senjata ilegal yang bertransaksi lintas negara.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengumpulkan data mengenai upaya negara-negara dalam melakukan penyitaan senjata ilegal dan ditemukan total 550.000 senjata api disita selama masing-masing tahun 2016 dan 2017 dan diprediksi bahwa senjata ilegal tersebut sebenarnya lebih tinggi dikarenakan banyak negara yang tidak mengumpulkan data regulasi senjatanya.<sup>3</sup>

---

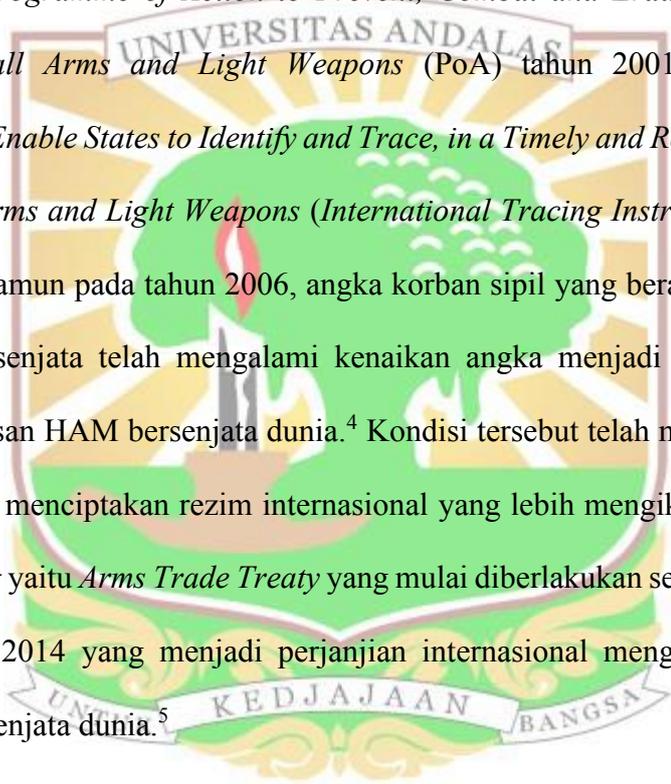
<sup>1</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms dan Other Conventional Arms: Synergies for Implementation* (2022; repr., Vienna: United Nations, 2016), diakses Desember 2022, <https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf>.

<sup>2</sup> Guillermo Vázquez dan Del Mercado, *Policy Brief Global Trade, Local Impacts Arms Trafficking dan Organized Crime* (The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Agustus 2022), diakses Desember 2022, [https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/08/GI-TOC-policy-brief\\_Arms-trafficking-web-1.pdf](https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/08/GI-TOC-policy-brief_Arms-trafficking-web-1.pdf).

<sup>3</sup> United Nations on Drugs and Crime, *Global Study On*, Maret 2020, [https://www.unodc.org/documents/data-dan-analysis/Firearms/2020\\_REPORT\\_Global\\_Study\\_on\\_Firearms\\_Trafficking\\_2020\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-dan-analysis/Firearms/2020_REPORT_Global_Study_on_Firearms_Trafficking_2020_web.pdf).

Besarnya penyitaan senjata ilegal menandakan bahwa sumber-sumber senjata ilegal tersebut belum teratasi secara efektif.

Negara-negara telah berupaya dalam menangani kasus senjata ilegal dengan mengeluarkan *Firearm Protocol* sebagai protokol menentang pembuatan dan perdagangan senjata api secara ilegal, bagian dan komponennya serta amunisi pada tahun 2001, *Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons (PoA)* tahun 2001, *International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (International Tracing Instrument* atau ITI) tahun 2005. Namun pada tahun 2006, angka korban sipil yang berasal dari korban kekerasan bersenjata telah mengalami kenaikan angka menjadi 90% dari total korban kekerasan HAM bersenjata dunia.<sup>4</sup> Kondisi tersebut telah mendorong PBB untuk kembali menciptakan rezim internasional yang lebih mengikat atau bersifat *legally binding* yaitu *Arms Trade Treaty* yang mulai diberlakukan secara resmi pada 24 Desember 2014 yang menjadi perjanjian internasional mengenai keamanan perdagangan senjata dunia.<sup>5</sup>



ATT diadopsi sebagai perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional tertinggi dan untuk mencegah serta memberantas perdagangan gelap dan pengalihan senjata konvensional. ATT tersebut beroperasi dalam kontrol yang

---

<sup>4</sup> “Small Arms—They Cause 90% of Civilian Casualties,” *Www.globalissues.org*, <https://www.globalissues.org/article/78/small-arms-they-cause-90-of-civilian-casualties>.

<sup>5</sup> Arms Trade Treaty, “Treaty Status,” <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883> (Diakses September 2022)

dilakukan oleh negara eksportir dan importir dengan memastikan tujuan transfer senjata yang dilakukan tidak akan melanggar HAM dan aman dari pasar ilegal.

Teknis pengimplementasian yang terdapat pada ATT tersebut sesuai dengan konsep rezim pada umumnya yang dirujuk dari artikel jurnal ‘The Study of International Regimes’ oleh Marc A Levy, Oran R Young, dan Michael Zurn dimana suatu rezim internasional dikatakan memiliki *principles and norms, rules, procedures, dan programs*. Implementasi ATT yang diharapkan pada umumnya mencakup upaya anggota dalam mematuhi regulasi impor dan ekspor senjata yang terbebas dari penggunaan yang berujung pada pasar gelap dan pelanggaran HAM. Dimana standar perubahan perilaku tersebut didukung oleh prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang terdapat pada teks ATT. Sehingga, dengan menggunakan konsep tersebut ATT dipandang sebagai rezim yang jelas dan mampu mengatur para anggotanya sesuai dengan ‘kecenderungan kepatuhan negara’ menurut Chayes dan Chayes yang juga didorong oleh adanya efisiensi, kepentingan, dan norma.<sup>6</sup> Hal ini memberikan penjelasan bahwa meskipun ATT tidak menyertakan sanksi namun dengan kejelasan substansi yang ada di dalamnya dan dengan isunya yang penting bagi hubungan internasional, maka penting bagi para aktor internasional untuk mematuhi.

Pemerintah internasional sudah berupaya dengan membentuk ATT tersebut, namun senjata api dan kekerasan HAM seperti pembunuhan masyarakat sipil masih terus menjadi masalah HAM yang krisis. Indeks kejahatan terorganisir global GI-TOC 2021 (Global Initiative against Transnational Organized Crime) masih

---

<sup>6</sup> Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (London: Harvard University Press, 1995), 1–28.

menempatkan perdagangan senjata sebagai pasar kriminal paling umum ketiga secara global, dan sangat marak di Amerika Latin terutama Brazil.<sup>7</sup> Adanya jumlah penyitaan senjata ilegal yang besar secara dunia dan dengan adanya urgensi permasalahan regulasi transfer senjata, meskipun telah diregulasi oleh rezim ATT sebagai rezim tertinggi, menjelaskan bahwa terdapat masalah implementasi negara anggota dalam mengimplementasi ATT.

Ditemukan bahwa Brazil, merupakan negara yang paling berpengaruh di Amerika Latin dan merupakan salah satu negara yang sangat mendukung terbentuknya ATT dan sudah mengadopsinya pada 12 November 2018.<sup>8</sup> Namun Brazil justru merupakan negara dengan angka kekerasan HAM akibat senjata tertinggi di dunia pada tahun 2021.<sup>9</sup> Bahkan angka kekerasan HAM tersebut semakin meningkat di era pemerintahan Bolsonaro yang merupakan presiden Brazil dari sejak 2019-2022. Kondisi tersebut menjadi momentum penulis dalam menelaah bagaimana permasalahan Brazil dalam mengimplementasi ATT sehingga berujung pada kondisi krisis perlindungan HAM dari senjata tersebut.

Kasus tersebut telah menempatkan Brazil ke dalam kondisi yang berbeda dari yang diharapkan setelah menjadi anggota ATT. Pelanggaran kekerasan HAM terhadap masyarakat sipil dan meningkatnya impor senjata yang sulit untuk diawasi

---

<sup>7</sup> Guillermo Vázquez del Mercado, "Arms Trafficking dan Organized Crime," *Global Initiative* (Global Initiative, Agustus 2022), diakses November 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/arms-trafficking-dan-organized-crime/>.

<sup>8</sup> Arms Trade Treaty, *States Parties to the ATT (in alphabetical order)*, (Geneva: Arms Trade Treaty, 25 Maret 2022), [https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20\(alphabetical%20order\)\(25%20Maret%202022\)/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20\(alphabetical%20order\)\(25%20Maret%202022\).pdf](https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(25%20Maret%202022)/List%20of%20ATT%20States%20Parties%20(alphabetical%20order)(25%20Maret%202022).pdf)

<sup>9</sup> World Population Review, "Gun Violence by Country 2021," *Worldpopulationreview.com* (World Population Review, 2022), diakses Oktober 2022, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-violence-by-country>.

dipicu terjadi sejak dekrit Bolsonaro diberlakukan sejak 2019.<sup>10</sup> Sehingga akibat dari dekrit tersebut, Brazil tercatat masih belum mengirimkan kewajiban laporan regulasinya kepada pihak ATT, dan bahkan telah melanggar komitmen Brazil terhadap pasal larangan, impor, dan ekspor yang menjadi aturan inti dari ATT. Dimana pelanggaran tersebut terletak pada ditiadakannya batasan impor senjata, pelemahan fungsi kepolisian federal Brazil dalam mengawasi senjata-senjata di Brazil, dan dengan diekspornya kembali senjata Brazil terhadap Paraguay.<sup>11</sup> Sehingga dekrit Bolsonaro tersebut merupakan suatu perilaku ketidakpatuhan sesuai dengan Oran R. Young dalam “Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications”, dimana ketidakpatuhan (atau pelanggaran) adalah perilaku yang gagal memenuhi persyaratan rezim tersebut dimana Brazil gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap ATT.

Ketidakpatuhan yang terjadi pada era Bolsonaro merupakan kondisi yang berbeda dengan pemerintahan Brazil sebelumnya. Dekrit Bolsonaro yang menjadi penyebab utama ketidakpatuhan tersebut juga terjadi akibat dukungan dan kelemahan kapasitas-kapasitas yang ada di dalam pemerintahan Brazil, untuk itu penulis akan meneliti bagaimana ketidakpatuhan Brazil tersebut dapat terjadi dengan menggunakan konsep Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam buku yang berjudul “The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements”.

---

<sup>10</sup> Pablo Dreyfus et al., *Small Arms in Brazil: Production, Trade, and Holdings Special Report, Small Arms Survey*, 2010, diakses 2023, <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-SR11-Small-Arms-in-Brazil.pdf>.

<sup>11</sup> Pablo Dreyfus et al, 2010

## 1.2 Rumusan Masalah

Brazil tercatat sebagai negara yang menandatangani ATT pada 03 Juni 2013, meratifikasi pada 14 Agustus 2018, dan sudah mengadopsi ATT secara resmi pada 12 November 2018. Brazil merupakan negara yang turut menginisiasi pembentukan ATT sejak dibentuknya ITI. Sehingga sikap tersebut mencerminkan bahwa Brazil adalah negara yang telah berinisiasi untuk mematuhi *Arms Trade Treaty* dengan memastikan bahwa transfer senjata tersebut tidak akan digunakan untuk pelanggaran HAM ataupun jatuh ke pasar gelap sesuai ketentuan inti ATT.

Namun, status pelanggaran HAM Brazil yang mencapai status negara kekerasan HAM bersenjata nomor satu dunia justru mencerminkan adanya perbedaan antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang terjadi di Brazil dari sejak bergabungnya Brazil ke dalam ATT.<sup>12</sup> Perbedaan perubahan perilaku dari model standar perilaku yang diharapkan ATT dengan yang terjadi pada Brazil menjelaskan adanya kepatuhan yang belum tercapai sesuai dengan definisi ketidakpatuhan Oran R. Young dalam “Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications”, dimana ketidakpatuhan (atau pelanggaran) adalah perilaku yang gagal memenuhi persyaratan rezim. Pemenuhan syarat rezim yang gagal tersebut dinilai dari Brazil yang melanggar aturan di dalam ATT seperti pada pasal 6, 7, 8 ATT yang mana di dalam pasal tersebut telah mengharuskan tranfer senjata yang bebas dari penggunaan yang ilegal. Selain itu, ketidakpatuhan atau tidak sesuainya perilaku Brazil dengan ATT juga dilihat dari

---

<sup>12</sup> Amnesty International, “Amnesty International: Submission to the 41st Session of the UPR Working Group, 7 – 18 NOVEMBER 2022,” *AMNESTY INTERNATIONAL* (AMNESTY INTERNATIONAL, Maret 2022), diakses November 2022, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/04/AMR1954322022ENGLISH.pdf>.

belumnya Brazil dalam mengirimkan laporan rutin pengimplementasian ATT sesuai dengan aturan pasal 13 ATT dari sejak Brazil meratifikasi ATT. Sehingga, dampak dari kepatuhan yang belum tercapai atau ketidakpatuhan tersebut telah mengakibatkan tingginya angka korban kekerasan HAM bersenjata Brazil serta menyebabkan masalah pasar gelap yang beroperasi di Brazil ke mancanegara masih menjadi masalah dunia. Untuk itu, penulis akan menjelaskan mengapa ketidakpatuhan Brazil terhadap *Arms Trade Treaty* pada penanganan regulasi perdagangan senjata Brazil pada tahun 2018-2022 dapat terjadi. Penulis akan meneliti dengan mendeskripsikan ketidakpatuhannya dan meneliti penyebab dari ketidakpatuhan tersebut berdasarkan konsep ketidakpatuhan Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam buku yang berjudul “The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements”.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Mematuhi suatu rezim merupakan hal penting dalam efektifitas rezim. Suatu tindakan aktual yang tidak selaras dengan resep atau aturan rezim adalah bentuk ketidakpatuhan seperti yang disampaikan oleh Oran Young. Perilaku ketidakpatuhan tersebut menurut Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes juga didorong oleh banyak hal baik dari segi ambiguitas teks rezim, keterbatasan kapasitas negara, maupun perubahan dimensi temporal.<sup>13</sup> Sehingga meneliti penyebab ketidakpatuhan Brazil ini menjadi penting sebagai bentuk upaya untuk mengatasi sumber pasar gelap senjata ilegal dan kekerasan HAM bersenjata tertinggi dunia. Untuk itu, pertanyaan penelitian dalam karya ilmiah ini ialah

---

<sup>13</sup> Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (London: Harvard University Press, 1995)

“mengapa ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT mengenai regulasi senjata tahun 2018-2022 dapat terjadi?”.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan atau penyebab dari perubahan perilaku Brazil yang tidak patuh terhadap ATT pada regulasi senjatanya dari tahun 2018-2022.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami tentang mengapa ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT terkait regulasi senjata ilegal pada tahun 2018-2022 dapat terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional terutama dalam isu ketidakpatuhan dan kaitannya dengan kondisi domestik negara anggota terhadap suatu rezim.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang penelitian ini, terutama dalam konteks ketidakpatuhan Brazil terhadap rezim ATT. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sebagai referensi untuk penelitian dimasa depan.

Kegunaan praktis lainnya dari penelitian ini ialah untuk membantu pemerintah terutama pemerintah negara-negara dalam memahami keadaan politik Brazil dan bagaimana perilaku Brazil dalam mematuhi dan mengimplementasi ATT

sehingga para pemerintah dapat menentukan perilaku politik internasionalnya terutama dalam menjalankan hubungan politik dengan Brazil terkait isu keamanan.

## 1.6 Studi Pustaka

Penulis menggunakan jurnal artikel karya Camila Asano dan Jefferson Nascimento yang berjudul “Arms as Foreign Policy: The Case of Brazil”.<sup>14</sup> Jurnal artikel tersebut menjelaskan ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT yang dilihat dari kebijakan ekspor Brazil yang dipandang melanggar kewajibannya sebagai negara yang mematuhi ATT. Ketidakpatuhan tersebut dijelaskan melalui donasi *aircraft* yang dilakukan oleh politik luar negeri Brazil terhadap Mozambik pada tahun 2013 dimana Brazil sudah menandatangani ATT. Hal tersebut mengakibatkan Brazil terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Mozambik pada saat itu sehingga hal tersebut melanggar peraturan dasar dari ATT yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan transfer senjata yang dilakukannya tidak melukai HAM.

Gagalnya Brazil dalam mengimplementasi ATT yang dijelaskan oleh Asano dan Nascimento tersebut juga memandang bahwa terdapat masalah transfer kebijakan internasional ke domestik Brazil yang menyebabkan Brazil melanggar ATT. Kedua penulis tersebut memberikan solusi-solusi dimana Brazil harus mampu menciptakan kerjasama yang sesuai antara kongres negara dengan agenda internasional yang telah disepakati oleh Brazil. Sehingga tidak sesuainya perilaku Brazil terhadap ATT bagi kedua peneliti tersebut terjadi dikarenakan proses intermestik yang ada di dalam domestik Brazil.

---

<sup>14</sup> Camila Asano dan Jefferson Nascimento, “Arms as Foreign Policy: The Case of Brazil,” *Sur - International Journal on Human Rights* 12, no. 22 (Desember 8, 2015): 1–4, diakses Oktober 26, 2022, <https://sur.conectas.org/en/arms-foreign-policy-case-Brazil/>.

Penulis menggunakan artikel jurnal tersebut dikarenakan kesamaan arah penelitian yang akan membahas bagaimana ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT dapat terjadi. Penulis juga memiliki kesamaan pemahaman dalam menggunakan kapasitas konstitusi dan legislatif Brazil sebagai faktor yang menyebabkan perilaku tidak patuh Brazil yang mencerminkan gagalnya ATT terimplementasi terjadi. Namun, perbedaan penelitian penulis dengan peneliti artikel jurnal tersebut terletak pada jenis kebijakan regulasi transfer senjata Brazil yang berbeda dimana penulis disini lebih membahas kebijakan impor senjata yang diubah oleh Bolsonaro dan kebijakan ekspor Brazil terhadap Paraguay, sedangkan penulis pada artikel tersebut lebih membahas kebijakan ekspor senjata Brazil dengan Mozambik.

Rujukan studi pustaka yang kedua, penulis menggunakan buku karya Renzo Taddei, Rodrigo C. Bulamah, dan Salvador Schavelzon yang berjudul “Bolsonaro and the Unmaking of Brazil”.<sup>15</sup> Di dalam buku tersebut, para penulis tersebut menjelaskan bagaimana pemerintahan Bolsonaro telah berdampak terhadap keamanan HAM masyarakat Brazil. Dengan kecenderungan rezim pemerintahan Bolsonaro yang mengarah kepada kepemilikan senjata dan bagaimana tindakan ekstrem yang diberikan kepada kepolisian federal Brazil telah menyebabkan peningkatan angka korban kekerasan HAM bersenjata.

Di dalam buku tersebut ditekankan bahwa Bolsonaro telah ‘merusak’ regulasi persenjataan dan keamanan lama Brazil dan membawa Brazil ke dalam tragedi HAM yang sangat membahayakan masyarakat sipil. Akibat citra tersebut, para penulis buku tersebut juga menekankan bahwa Bolsonaro telah menghambat

---

<sup>15</sup> Renzo Taddei, Rodrigo C. Bulamah, dan Salvador Schavelzon, *Introduction: Bolsonaro dan the Unmaking of Brazil*, *Society for Cultural Anthropology* (Sao Paolo: Hot Spots/Fieldsights, 2020), 3–6.

atau bahkan memberikan dampak buruk terhadap upaya Brazil dalam agenda internasional termasuk dalam mematuhi rezim-rezim keamanan internasional yang selama ini telah dijalankan Brazil.

Buku tersebut berkontribusi bagi penelitian penulis dalam menguatkan pengaruh Bolsonaro sebagai salah satu penyebab masalah pelanggaran HAM Brazil. Namun berbeda dengan para penulis tersebut, penulis akan lebih mengarahkan kepada pengaruh Bolsonaro yang terlibat sebagai penyebab ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT terjadi dengan menggunakan konsep ketidakpatuhan.

Penulis menggunakan artikel jurnal ketiga milik André Duffes Teixeira Aranega dan Kai Michael Kenkel yang berjudul “Gun Policy, Violence, and Peace: Examining the Challenges Faced by Civil Society and the State in Brazil” sebagai rujukan yang juga berkontribusi dalam penelitian penulis.<sup>16</sup> Di dalam artikel jurnal tersebut, dijelaskan bahwa keamanan di Brazil dan upaya pengamanannya sangat minim terutama terhadap masyarakat *afro-Brazilian*, masyarakat asli Brazil dan para aktivis HAM. Bahkan kasus pembunuhan bersenjata lebih tinggi terjadi daripada kematian akibat penyakit ataupun alasan lainnya di Brazil. Artikel ini memperkuat tingginya prioritas isu keamanan HAM bersenjata di Brazil yang seharusnya menjadi fokus dari pemerintahan.

Duffes Teixeira Aranega dan Kai Michael Kenkel menemukan bahwa peredaran senjata api yang lebih besar memiliki hubungan langsung dengan meningkatnya pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya. Mereka juga mengatakan

---

<sup>16</sup> Danré Duffles Teixeira Aranega dan Kai Michael Kenkel, “Gun Policy, Violence, and Peace: Examining the Challenges Faced by Civil Society dan the State in Brazil,” *Rethinking Peace and Conflict Studies* (Oktober 29, 2021): 173–201.

bahwa semakin banyak jumlah senjata juga akan menyulitkan upaya untuk menyaring dan memonitoring senjata agar tidak jatuh kepada kelompok kriminal Brazil. Sehingga pandangan tersebut berkontribusi dalam memvalidasi tindakan dari Presiden Bolsonaro yang meningkatkan import senjata untuk dilegalkan kepada masyarakat sipil sebagai kebijakan yang justru membahayakan masyarakat sipil.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Duffes dan Kai dengan penulis terletak pada unit analisis yang berbeda. Unit analisis yang diteliti oleh Duffes dan Kai ialah kondisi domestik Brazil yang bermasalah dengan regulasi senjata ilegal maupun penyalahgunaan senjata oleh masyarakat sipil, sedangkan unit analisis penulis dalam karya ilmiah ini ialah bagaimana Brazil tidak patuh terhadap ATT yang dilihat dari perubahan perilaku Brazil yang seharusnya lebih mengawasi dan menjamin keamanan impor senjata namun justru melonggarkan pengawasan tersebut melalui dekrit Bolsonaro. Meskipun sama-sama membahas bagaimana kasus regulasi senjata ilegal di Brazil, namun penulis lebih meneliti bagaimana kondisi tersebut berhubungan dengan kepatuhan Brazil dengan ATT.

Pendapat kedua peneliti tersebut juga sejalan dengan rujukan studi pustaka keempat yaitu milik Cecília Olliveira, seorang jurnalis yang menganalisis “More Guns, Fewer Control Mechanism: Brazilian Journalist Analyzes Bolsonaro’s Gun Policy”.<sup>17</sup> Ia melakukan penelitian lapangan yang menganalisis bagaimana keadaan domestik Brazil setelah Bolsonaro mengeluarkan perizinan kepemilikan senjata. Cecília menemukan bahwa keberadaan senjata yang meningkat pesat tersebut telah

---

<sup>17</sup> Cecília Olliveira, “Sou Da Paz – Global Voices | More Guns, Fewer Control Mechanisms: Brazilian Journalist Analyzes Bolsonaro’s Gun Policy,” Instituto Souda Paz, dimodifikasi 2022, diakses Desember 9, 2022, <https://soudapaz.org/noticias/global-voices-more-guns-fewer-control-mechanisms-Brazilian-journalist-analyzes-bolsonaros-gun-policy/>.

menimbulkan *gang-gang* bersenjata yang baru bermunculan selain PCC dan CV yang sudah lama ada. Ditemukan bahwa CACs yang menjadi syarat kepemilikan senjata justru tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya dan malah mengizinkan siswa sekolah untuk memiliki dan membawa senjata ke sekolah. Fenomena tersebut menurutnya adalah pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pemerintah Brazil. Bahkan, akibat dari kemudahan administrasi permohonan kepemilikan senjata tersebut para kelompok kriminal kini lebih mudah memperoleh senjata dengan ikut mendaftar sebagai pemohon kepemilikan senjata akibat kemudahan registrasi tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut berkontribusi bagi penulis dalam memperkuat klaim ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT yang diinterpretasikan dari dekret Presiden Bolsonaro. Penelitian Cecilia juga berkontribusi dalam memberikan penjelasan fakta dampak dari kebijakan Bolsonaro yang mencerminkan adanya pengaruh pemerintahan Brazil sebagai faktor pendorong terjadinya ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Namun, letak perbedaan penelitian Cecilia dengan penulis ialah terletak pada tujuan penelitian yang dilakukan. Cecilia lebih bertujuan untuk menjelaskan kegagalan Bolsonaro dan dekretnya dalam upayanya untuk mengurangi kriminal yang justru malah sebaliknya, sedangkan penulis lebih meneliti bagaimana tindakan Bolsonaro tersebut sebagai salah satu faktor ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT yang kemudian menjadi penyebab meningkatnya angka korban sipil dari aksi kekerasan senjata di Brazil.

Pada studi pustaka selanjutnya, penulis menggunakan artikel milik Deborah Carvalho Malta dan teman-teman yang berjudul “Association between firearms and mortality in Brazil, 1990 to 2017: a global burden of disease Brazil study”. Dalam

artikel tersebut ditemukan adanya hubungan yang erat antara jumlah senjata api dengan kekerasan bersenjata yang terjadi di Brazil. Hubungan tersebut dijelaskan bahwa semakin kecil regulasi penyitaan senjata terhadap suatu komunitas masyarakat Brazil maka semakin besar angka pembunuhan yang terjadi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini menekankan bahwa tingkatan regulasi penyitaan/ pengumpulan senjata sangat mempengaruhi tingkat kematian akibat senjata.

Di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa faktor sifat multi-kausal kekerasan oleh hubungan erat antara kemiskinan, kesenjangan sosial, disintegrasi keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta dengan tidak adanya kebijakan sosial dan keamanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi tingkat kekerasan bersenjata. Maka penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan pentingnya regulasi senjata api terutama pengurangan jumlah senjata yang beredar pada masyarakat sipil untuk mengurangi kekerasan HAM serta adanya peran kebijakan pemerintah dalam kepentingan/ kebutuhan masyarakat untuk menangani kekerasan HAM bersenjata di Brazil.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada aktor-aktor yang terlibat dalam isu kekerasan bersenjata yang terjadi pada Brazil. Artikel jurnal tersebut lebih menekankan pada lemahnya regulasi pemerintah Brazil yang berdampak terhadap keamanan HAM masyarakat sipil, sedangkan penulis akan mendeskripsikan lebih luas mengenai penyebab kekerasan HAM bersenjata semakin meningkat yang tidak hanya disebabkan oleh pemerintah Brazil tapi juga oleh faktor-faktor lain seperti ambiguitas traktat ATT dan perubahan-perubahan pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik Brazil.

Penelitian terakhir yang dirujuk oleh penulis ialah “U.S. Policy and the Arms Trade Treaty”.<sup>18</sup> Penelitian tersebut berkontribusi dalam menjelaskan peran Amerika Serikat dalam mempengaruhi transfer senjata di Brazil terutama senjata ilegal yang jatuh ke tangan kelompok kriminal Brazil. Penelitian tersebut juga menjelaskan alasan AS tidak meratifikasi ATT dikarenakan AS menyebutkan bahwa ATT tidak cocok dengan operasional rahasia yang dimiliki AS sehingga sulit bagi AS untuk mematuhi.

Penelitian tersebut berkontribusi dalam memberikan perbandingan kepada penulis mengenai perbedaan AS dan Brazil dalam menyikapi ATT. Posisi Amerika Serikat dan Brazil yang menjadi negara dengan kekerasan bersenjata tertinggi dengan perbedaan statusnya dalam meratifikasi ATT merupakan kedua fenomena yang penting untuk dibandingkan. Dengan memahami alasan AS yang tidak meratifikasi ATT maka penulis dapat mempertimbangkan motivasi Brazil meratifikasi ATT yang akan turut mempengaruhi performa status ketidapatuhannya terhadap ATT. Kemudian juga dapat berkontribusi dalam menjawab bagaimana kapabilitas domestik Brazil yang serupa dengan AS tersebut mampu mendorong Brazil untuk berpotensi dalam melanggar dan tidak patuh terhadap ATT.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada unit analisis yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan AS sebagai unit analisis penelitian, sedangkan penulis menggunakan Brazil sebagai unit analisis. Namun, kesamaan antara kedua karya ilmiah tersebut terletak pada kesamaan perilaku

---

<sup>18</sup> RACHEL STOHL, “U.S. Policy and the Arms Trade Treaty,” *Project Ploughshares Working Paper 10-1* (April 2010): 5–44, diakses November 2022, <https://ploughshares.ca/wp-content/uploads/2012/08/WP10.1.pdf>.

negara yang aktif dalam proses perumusan ATT, kesamaan kondisi domestik terkait senjata api, dan kesamaan kondisi kedua negara dalam isu kekerasan bersenjata.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Konsep Ketidapatuhan

Penulis menggunakan konsep definisi ketidapatuhan dari Oran R. Young untuk mendefinisikan ketidapatuhan negara anggota rezim dan menggunakan konsep ketidapatuhan milik Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes mengenai sumber-sumber ketidapatuhan sebagai panduan meneliti penyebab ketidapatuhan Brazil terhadap ATT. Menurut Oran R. Young dalam “Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications”, istilah ketidapatuhan mengacu pada perilaku yang gagal memenuhi persyaratan tersebut.<sup>19</sup> Menurut Oran R. Young, upaya untuk mengurangi ketidapatuhan atau mengurangi peluang untuk tidak patuh ialah dengan tiga cara intervensi; (1) hukuman atau penghargaan, (2) sistem inspeksi yang beroperasi untuk mengurangi kemungkinan subjek terlibat dalam pelanggaran yang tidak terdeteksi, dan (3) penyimpanan catatan publik sehingga subjek yang melanggar resep selanjutnya akan dibebani dengan catatan perilaku tidak patuh.<sup>20</sup> Sehingga menurutnya, ketidapatuhan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam rezim internasional dapat dilihat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat kewajiban aktor tersebut dengan melihat dari cara-cara intervensi yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Oran R. Young, *Compliance & Public Authority*, ed. Oran R. Young, 1st ed. (1979; repr., RFF Press, 2013).

<sup>20</sup> Oran R. Young, *Compliance & Public Authority*, ed. Oran R. Young, 1st ed. (1979; repr., RFF Press, 2013).

Meneliti penyebab atau faktor pendorong dari ketidakpatuhan suatu negara atau aktor lainnya dalam mematuhi rezim dapat dijelaskan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam buku yang berjudul “The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements” pada bagian ‘kecenderungan untuk mematuhi’ pada bagian ‘Sumber Ketidakpatuhan’.<sup>21</sup> Chayes dan Chayes mengatakan bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara dapat terjadi dikarenakan ketidaksengajaan yang secara langsung berniat untuk melanggar suatu rezim. Chayes dan Chayes mengemukakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu keadaan yang dihadapi oleh anggota rezim sangat mempengaruhi bagaimana ketidakpatuhan bisa saja terjadi. Faktor atau keadaan yang mampu menyebabkan ketidakpatuhan tersebut ialah (1) ambiguitas dan ketidakpastian bahasa perjanjian, (2) keterbatasan kapasitas para pihak untuk melaksanakan usaha mereka, dan (3) dimensi temporal dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan adaptasi perubahan untuk sesuai dengan rezim. Dengan menggunakan faktor-faktor penyebab tersebut, dapat dianalisis mengapa suatu aktor gagal dalam mematuhi rezim yang akan berdampak dengan implementasi negara terhadap suatu rezim. Variabel atau faktor penyebab tersebut ialah:

### *1. Ambiguity*

Adanya makna yang ambigu di dalam aturan rezim mampu memberikan interpretasi yang berbagai macam dan memicu kesalahpahaman dalam memahaminya. Penyebab dari ketidakjelasan tersebut disebabkan karena

---

<sup>21</sup> Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (London: Harvard University Press, 1995), 1–28.

kurangnya kepastian yang jelas tentang suatu bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh semua negara anggota terhadap interpretasi suatu perjanjian tersebut. Menurut Chayes dan Chayes adanya penggunaan bahasa dan kata yang semakin luas maka dapat memicu munculnya banyak interpretasi yang dapat menimbulkan ambiguitas. Kalimat yang umum yang digunakan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tertentu. Jika ambiguitas terjadi maka akan mengakibatkan perbedaan pemahaman antar negara dalam menginterpretasi dan menjalankan rezim. Akibatnya, isi perjanjian menjadi semakin tidak jelas di antara negara-negara anggota dan dapat memicu kerugian negara anggota. Sehingga hal ini dapat memberi ruang bagi negara-negara untuk membatasi komitmen mereka/tidak menghormati dan mengimplementasikan apa yang dikatakan dalam perjanjian.

Penggunaan variabel ini, penulis akan menggunakan teks konvensi untuk melihat bagaimana kejelasan aturan yang harus dipatuhi negara anggota terhadap pelaksanaan ATT. Tujuan penulis dalam menganalisa indikator ambiguitas di dalam teks ATT ialah untuk menemukan seberapa jelas pembahasan perintah keharusan yang diberikan oleh ATT terhadap negara anggotanya, seberapa jelas dan spesifik aturan-aturan yang ada, dan kemudian seberapa paham pembahasan teks ATT terhadap kondisi-kondisi domestik negara-negara anggotanya dalam mematuhi. Penulis juga akan meneliti bagaimana tanggapan langsung pihak Brazil terhadap diksi atau substansi yang ada di dalam ATT untuk memperkuat penjelasan mengenai dampak ambiguitas ATT terhadap ketidakpatuhan Brazil.

### *1. Limitation on Capacity*

Meskipun perumusan suatu rezim merupakan hasil dari kepentingan bersama, namun dalam implementasinya akan beragam sesuai dengan kapasitas negara masing-masing. Kemampuan kapasitas yang dimaksud oleh Chayes dan Chayes terletak pada kemampuan negara dalam memanfaatkan, meregulasi, dan menyesuaikan sumber daya yang ada di dalam negara. Meskipun pejabat pemerintah yang bertugas dalam meratifikasi suatu rezim internasional telah berupaya dalam membentuk undang-undang untuk kepatuhannya terhadap rezim tersebut, namun jika perilaku pihak-pihak domestik tidak mampu menjalankan implementasian tersebut, maka ketidakpatuhan dapat terjadi. Pada akhirnya kemauan politik dan pembangunan aparatus regulasi merupakan penentu dari kepatuhan suatu negara. Untuk menilai kemampuan aparatus tersebut, Chayes dan Chayes memberikan acuan pengukuran dari segi kapasitas birokrasi dan penegakan hukum serta sumber daya fiskal jika suatu negara tersebut termasuk ke dalam negara berkembang atau negara dengan ketidakstabilan keuangan. Hal ini dikarenakan peran dari aparat penegak hukum, birokrasi, dan keuangan tersebut yang sangat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk melakukan penyesuaian dengan rezim internasional.

Penulis akan menganalisis kapasitas negara Brazil terkait kapasitas birokrasi lembaga-lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana rezim ATT yaitu birokrasi lembaga pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterbatasan yang dialami oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif negara Brazil tersebut dalam mematuhi ATT akan memberikan gambaran mengenai penyebab ketidakpatuhan Brazil dapat terjadi.

## 2. *The Temporal Dimension*

Suatu perjanjian internasional dibuat untuk mengatasi suatu masalah global untuk jangka waktu tertentu. Namun, implementasi perjanjian atau aturan tersebut di tingkat nasional tentu membutuhkan waktu yang beragam sesuai dengan adaptasi intermestik negara anggota yang menyesuaikan segala intansi maupun kondisi sosialnya dengan rezim yang telah diadopsi. Pada umumnya dalam mematuhi suatu aturan rezim yang telah disepakati bersama akan dipengaruhi oleh kondisi iklim, sosial, politik dan ekonomi. Kondisi-kondisi tersebut turut mempengaruhi ketidapatuhan suatu negara diakibatkan besarnya pengaruhnya dalam menghambat ataupun mendukung suatu rezim. Untuk itu, dalam mematuhi perjanjian internasional agar dapat bertahan maka tentu dibutuhkan strategi dan upaya dalam menghadapi kondisi-kondisi iklim, sosial, ekonomi, maupun politik yang sangat mempengaruhi jalannya rezim pada domestik suatu negara.

Meurut Chayes dan Chayes perjanjian internasional yang berada pada permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) membutuhkan perubahan adaptasi yang lebih rumit dikarenakan adanya peluang perbedaan pemahaman HAM yang ada pada domestik negara. Sering kali terjadi perbedaan antara HAM menurut nilai-nilai budaya domestik dengan HAM secara universal yang secara praktiknya pun sering mengalami ragam permasalahan perbedaan. Untuk itu, ATT sebagai rezim internasional dengan tujuan perlindungan HAM dapat mengalami perbedaan interpretasi bagi negara-negara yang memiliki perbedaan pemahaman dalam perlindungan HAM dan dapat dipengaruhi oleh keadaan domestik suatu negara yang sudah memiliki masalah dengan perlindungan HAM.

Penulis akan menganalisis perubahan kondisi temporal melalui perubahan yang terjadi pada kondisi politik internal, dan kondisi sosial-ekonomi Brazil sebagai dua dimensi dominan yang mempengaruhi ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Seperti yang dijelaskan oleh Chayes dan Chayes, adaptasi domestik negara memiliki pengaruh yang besar dalam upaya kepatuhan negara terhadap suatu rezim internasional. Sehingga, menganalisis bagaimana perubahan domestik Brazil terutama perubahan politik dan sosial-ekonomi di Brazil menjadi penting bagi penulis dalam menilai indikator ini.

Melalui konsep ini, penulis akan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam menjelaskan bagaimana ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT dapat terjadi dengan memaparkan data dan fakta yang memperkuat penelitian indikator-indikator tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator dari konsep tersebut, penulis akan menjelaskan bagaimana pembahasan teks ATT, kapasitas aparatus yang berfungsi dalam mematuhi ATT, dan kondisi domestik yang dialami oleh Brazil dalam mempengaruhi ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu mekanisme untuk melihat bagaimana pengetahuan tentang suatu fenomena diperoleh. Metode penelitian membantu penulis untuk menganalisis fenomena secara sistematis dan konsisten, serta hasil yang lebih baik seperti yang diharapkan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena secara mendetail dengan memperhatikan unsur-unsur yang tidak dapat dinilai dengan angka terutama pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam

upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.<sup>22</sup> Sehingga, penulis akan membahas secara mendalam tentang bagaimana hubungan antar instansi/pejabat Brazil dalam ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah eksplanatif analisis yang dilakukan dengan mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi menjadi suatu yang lebih rinci.<sup>23</sup> Jenis penelitian ini akan membahas fenomena-fenomena dalam menjelaskan tentang mengapa Brazil tidak patuh terhadap ATT. Selanjutnya, dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatif analisis ini, penulis diharapkan mampu menyampaikan serta menjawab permasalahan yang diteliti dengan lebih baik dan rinci.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada rentang tahun 2018-2022. Adapun tahun 2018 karena Brazil tercatat telah meratifikasi ATT pada 14 Agustus 2018, dan sudah mengadopsi ATT secara resmi pada 12 November 2018. Disamping itu, adanya isu Brazil sebagai negara dengan angka tertinggi kekerasan bersenjata yang terdata dari tahun 2019 hingga 2021 yang bertepatan dengan keluarnya dekrit Presiden Bolsonaro dalam perizinan kepemilikan senjata terhadap masyarakat sipil menjadi fenomena yang turut mempengaruhi ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT yang berimplikasi pada implementasi ATT pada Brazil.

---

<sup>22</sup> Ruhanita Maelah, *Sustaining Competitiveness in a Liberalized Economy : The Role of Accounting* (Newcastle: Cambridge Scholars, 2009).

<sup>23</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial : (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, ed. H. Martinis Yamin (Jakarta: GP Press, 2008).

Penulis memilih 2022 sebagai Batasan akhir penelitian dikarenakan adanya kekerasan bersenjata yang masih berlanjut hingga pada tahun 2022 mengenai perilaku polisi federal terhadap masyarakat Afro turut menjadikan rentang tahun ini menarik untuk dibahas dalam mempertanyakan bagaimana kebijakan keamanan Brazil dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Rasionalitas lainnya dikarenakan pada November 2022, Jair Bolsonaro sebagai presiden sayap kanan berhasil dilengserkan oleh sayap kiri Brazil dengan menjadikan Luiz Inacio Lula da Silva sebagai Presiden Sayap Kiri Brazil yang menandakan dekrit presiden Bolsonaro terkait legalitas senjata akan ditangguhkan. Hal ini menarik dikarenakan penulis akan melihat bagaimana sikap ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT setelah 4 tahun diratifikasi pada rentang waktu 2018-2022 yang mencerminkan bagaimana implementasi ATT di negara tersebut selama kurun waktu tersebut.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari suatu fenomena itu dapat terjadi.<sup>24</sup> Unit analisis pada penelitian ini ialah ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT, karena di dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana perilaku Brazil yang tidak sesuai dengan aturan rezim ATT. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Adapun unit eksplanasi penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Dengan menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam

---

<sup>24</sup>Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

ATT yang telah diratifikasi Brazil sebagai acuan memahami perilaku ketidapatuhan Brazil, penulis akan menganalisisnya dengan konsep ketidapatuhan milik Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes.

Pada penelitian ini terdapat level analisis yaitu berada pada level analisis di tingkat negara. Karena penulis akan melihat bagaimana Brazil melanggar atau melakukan ketidapatuhan ATT dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidapatuhan Brazil tersebut terkhusus pada regulasi senjata Brazil. Maka model hubungan unit analisa dengan unit eksplanasinya ialah model reduksionis dimana unit eksplanasinya lebih rendah daripada unit analisa.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Dimulai dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan penelitian atau informasi yang dipublikasikan sebelumnya sebagai data sekunder yaitu dari buku yang berjudul “Bolsonaro and the Unmaking of Brazil”, jurnal-jurnal antara lain “Arms as Foreign Policy: The Case of Brazil”, “Gun Policy, Violence, and Peace: Examining the Challenges Faced by Civil Society and the State in Brazil”, “More Guns, Fewer Control Mechanism: Brazilian Journalist Analyzes Bolsonaro’s Gun Policy”, “Association between firearms and mortality in Brazil, 1990 to 2017: a global burden of disease Brazil study”, dan “U.S. Policy and the Arms Trade Treaty”. Kemudian penulis juga menggunakan laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime 2020*, *U.S. Biggest Source of Illegal Foreign Guns in Brazil: Report 2018*, dan *Gun Violence by Country 2021*. Penulis juga menggunakan website resmi Arms Trade Treaty dan Arms Trade Treaty Baseline Project sebagai

sumber informasi primer utama. Penulis juga menggunakan beberapa kata kunci untuk mengambil data seperti Brazil, Ilegal, Ketidapatuhan, Kartel, Senjata.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses di mana mengorganisasikan data untuk mendapatkan pola dan bentuk keteraturan yang selanjutnya menginterpretasikan data yang telah terorganisir untuk sampai pada hasil penelitian. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna terhadap pola/bentuk keteraturan yang ditemukan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif. Dimulai dengan mengumpulkan data yang dihasilkan dari berbagai sumber kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai konsep yang digunakan.

Langkah selanjutnya, penulis akan memilih data yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dan diklasifikasikan berdasarkan variabel dari konsep yang digunakan berdasarkan ketidapatuhan dikarenakan *ambiguity* terutama ambiguitas dalam bahasa yang digunakan dalam aturan-aturan ATT, ketidapatuhan dikarenakan *limitation on capacity* yaitu dalam kapasitas legislatif, eksekutif, dan yudikatif Brazil dalam mematuhi ATT termasuk perubahan dimensi/ *the temporal of dimension* yang dilihat dari kerumitan masalah yang mempengaruhi adaptasi Brazil dalam mengupayakan kepatuhannya terhadap ATT . Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan masing-masing indikator per-variabel untuk mendapatkan jawaban yang akan ditarik untuk menjadi kesimpulan kesimpulan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian seperti jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Sistematika pada BAB I ini akan menjadi gambaran dasar dalam penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami pengetahuan dasar dari penelitian ini.

### **BAB II PERMASALAHAN REGULASI SENJATA BRAZIL**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang dinamika permasalahan konflik senjata di Brazil yang memicu pelanggaran HAM bersenjata di Brazil. Serta menjelaskan tentang kondisi perdagangan senjata ilegal dan peraturan regulasi senjata Brazil yang telah mempengaruhi tingkat kekerasan HAM bersenjata di Brazil. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang perilaku aparat keamanan dan pemerintah Brazil dalam menjalankan regulasi senjatanya.

### **BAB III REZIM ATT DALAM UPAYA PEMBERATASAN KEKERASAN BERSENJATA BAGI BRAZIL**

Bab ini akan membahas mengenai rezim ATT sebagai suatu rezim internasional yang berfokus pada permasalahan transfer senjata dan pengawasannya terhadap perlindungan HAM. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana standar kepatuhan suatu negara anggota ATT terhadap aturan-aturan ATT sebagai standar

kepatuhan Brazil terhadap ATT. Serta akan melihat bagaimana perilaku ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT.

#### **BAB IV ANALISIS PENDORONG KETIDAKPATUHAN BRAZIL TERHADAP ATT**

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan analisis mengenai mengapa Brazil dapat tidak patuh terhadap ATT yang dinilai dari perilaku pelanggarannya terhadap traktat tersebut dalam rentang tahun 2018-2022.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab sebelumnya dan juga terdapat saran dari penulis untuk para pihak yang terlibat serta bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini agar lebih baik.

